

## ABSTRAK

Pentingnya pengawasan oleh pemerintah adalah suatu sikap preventif dalam menghadapi peredaran produk makanan tidak layak demi memberikan perlindungan kepada konsumen dan tindakan represif bagi pelaku usaha yang melanggar aturan dengan sewenang-wenang mengedarkan produk makanan yang dilarang. Dibentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak adalah badan yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Masih adanya peredaran produk makanan kadaluarsa yang disebabkan kelalaian beberapa oknum pelaku usaha, konsumen yang belum mampu bersikap kritis, dan kurang efektifnya fungsi pengawasan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan Sifat Penelitian Deskriptif dan Teknik Analisis Kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang terjadi. Penelitian yang mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha atas Beredarnya Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa oleh BBPOM di Pontianak Barat. Kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha juga belum sepenuhnya memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang dijual menimbang masih banyaknya konsumen yang menemukan makanan dan minuman kedaluwarsa yang masih dijual. BBPOM Pontianak dalam mencegah maraknya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi dengan melakukan pengecekan secara rutin ke sarana produksi dan distribusi dimana hal tersebut sebagai tindakan pemantauan sebelum makanan sampai pada tangan konsumen. BBPOM juga memiliki kewenangan untuk memberikan ijin edar terhadap makanan dan minuman yang telah layak untuk dikonsumsi. Kinerja BBPOM belum bisa memantau secara maksimal dengan alasan terbatasnya SDM yang tersebar dalam wilayah Pontianak. BBPOM Pontianak belum maksimal dalam melakukan upaya-upaya mencegah makanan dan minuman kemasan kedaluwarsa yang beredar dimana dapat dibuktikan dengan masih banyaknya para konsumen yang menemukan produk kedaluwarsa. Namun, BBPOM memberikan sanksi tegas diantaranya upaya pembinaan bahkan penegakan hukum kepada pelaku usaha bila diperlukan.

**Kata Kunci : Penerapan Sanksi Hukum, Pelaku Usaha, Makanan dan Minuman Kedaluwarsa**

## ABSTRACT

The importance of supervision by the government is a precautionary attitude in dealing with the circulation of inappropriate food products to provide protection to consumers and repressive measures for business actors who violate the rules by arbitrarily distributing prohibited food products. The establishment of the Pontianak Food and Drug Supervisory Center (BBPOM) is to oversee the circulation of drugs and food in the West Kalimantan region. There is still circulation of expired food products caused by some unscrupulous business actors, considerations that are not able to evaluate critically, and the ineffectiveness of the supervisory function by the government.

In this study, the author uses Empirical Legal Research Methods with Descriptive Research Characteristics and Qualitative Analysis Techniques. This type of qualitative research is a type of research that occurs with the process of obtaining data that is what it is that discusses and describes the existing data according to the existing situation. Research that reveals attitudes, attitudes, relationships, and views that occur in respondents.

The results obtained from this study are the application of legal sanctions for business actors for the circulation of expired food and beverage products by BBPOM in West Pontianak. The lack of awareness from business actors has also not fully paid attention to the quality of the food and beverages sold, considering that there are still many consumers who find expired food and drinks that are still being sold. BBPOM Pontianak in preventing the proliferation of food and beverages that are not suitable for consumption by conducting regular checks on production and distribution facilities where this is a monitoring measure before food reaches consumers. BBPOM also has the authority to issue distribution permits for food and beverages that are fit for consumption. The performance of BBPOM has not been able to monitor optimally due to the limited human resources scattered in the Pontianak area. BBPOM Pontianak has not been maximal in making efforts to prevent expired packaged food and beverages in circulation which can be proven by the large number of consumers who find expired products. However, BBPOM provides strict sanctions including efforts to foster and even enforce the law to business actors if needed.

**Keywords:** **Application of Legal Sanctions, Business Actors, Expired Food and Beverages**